

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Permasalahan

Laporan keuangan pada sektor publik khususnya laporan keuangan pemerintah merupakan suatu wujud transparansi demi syarat pendukung adanya akuntabilitas yaitu suatu kejelasan pemerintah atas kegiatan pengelolaan sumber daya publik. Penyusunan laporan keuangan merupakan keharusan yang dilakukan oleh pemerintah untuk mempertanggungjawabkan kegiatan keuangan kepada masyarakat sehingga manfaat informasi dalam laporan keuangan pemerintah tersebut harus benar dan berkualitas.

Aktivitas pemerintah sangat berkaitan dengan proses sistem penganggaran yang mempunyai berbagai keperluan serta peran dari pejabat birokrasi yang ada didalamnya. Semua proses penganggaran akan mungkin terjadinya penyelewengan yang akan menyebabkan pemborosan serta ketidak efektifan atas anggaran tersebut. Sejak dari awal perencanaan, penyusunan, pelaksanaan serta pelaporan anggaran. Dengan hal demikian, sangat dibutuhkan adanya sistem pengendalian internal yang baik agar dapat menghentikan serta mengurangi risiko kecurangan yang mungkin akan terjadi.

Definisi sistem pengendalian internal sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 yaitu proses yang terintegrasi pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai dan tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. Sistem pengendalian internal merupakan hal terpenting dalam mewujudkan pemerintahan yang baik.

Hal yang dikemukakan oleh Menteri Keuangan Mulyani (2016) yang menyatakan bahwa Pemerintah Daerah untuk tidak cepat puas dengan raihan predikat WTP dari hasil audit laporan keuangan yang dilakukan oleh BPK, karena

pada kenyataannya walaupun mendapat opini WTP, masih banyak kepala daerah yang tersangkut kasus korupsi. Hal inilah yang perlu diperhatikan dalam Sistem Pengendalian Internal pada Pemerintah Daerah tersebut dan Peraturan Perundang-undangan.

Kualitas laporan keuangan pemerintah daerah juga tercermin dari hasil pemeriksaan BPK. Pemeriksaan atas laporan keuangan dibagi dalam rangka membagikan pendapat/opini atas kewajaran informasi keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan (Rajagukguk, 2020). Opini yaitu pernyataan pemeriksa mengenai kebenaran informasi keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan berdasarkan pada (a) kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintah, (b) kecukupan pengungkapan, (c) kepatuhan terhadap peraturan perundang-undang, dan (d) efektivitas sistem pengendalian intern.

Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK atas pemerintah Provinsi Sumatera Selatan menyatakan bahwa dari tahun 2016-2020 terdapat kelemahan sistem pengendalian internal. Berikut merupakan kelemahan sistem pengendalian internal Provinsi Sumatera Selatan.



sumber : diolah oleh penulis, 2021

Gambar 1.1
Grafik Kelemahan Sistem Pengendalian Internal Provinsi Sumatera Selatan

Berdasarkan gambar 1.1, Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas laporan keuangan pemerintah Provinsi Sumatera Selatan tahun anggaran 2016 terdapat kelemahan sistem pengendalian internal dalam pemerintahan tersebut. Ditemukan pengelolaan dan pelaporan persediaan pada beberapa SKPD belum tertib,

penyusunan anggaran pendapatan dan belanja daerah pemerintah provinsi kurang memperhatikan kemampuan keuangan daerah, pelaksanaan pengalihan aset personil, pendanaan, sarana dan prasarana serta dokumen dari Kabupaten/Kota ke Provinsi belum memadai, pengelolaan kas pada BPKAD dan Dinas Pendapatan Daerah Pemerintah Provinsi belum memadai. Serta pelaksanaan kerjasama antara Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan dengan PT Bank Sumsel Babel di tahun 2016 belum memiliki dasar perjanjian serta sistem pengendalian intern atas pengelolaan keuangan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan belum memadai.

Pada Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) yang dilakukan oleh BPK pada Laporan Keuangan tahun 2017. Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan memperoleh kelemahan sistem pengendalian internal meliputi pengelolaan pendapatan tidak tertib dan terdapat penggunaan langsung sebesar Rp236.980.000, pelaksanaan tarif progresif atas pajak kendaraan motor belum optimal, potensi penerimaan daerah atas pemanfaatan barang milik daerah sebesar Rp2.506.870.000 belum dapat dimanfaatkan, penyajian realisasi belanja langsung Dana BOS dan PSG tidak berdasarkan pertanggungjawaban riil sekolah, pengelolaan belanja bantuan hibah tahun 2017 belum sesuai kebutuhan, klasifikasi penganggaran belanja modal, belanja barang dan jasa, dan belanja pegawai tidak tepat sebesar Rp84.137.417.926, pengelolaan rekening milik Provinsi Sumatera Selatan tidak tertib, empat OPD tidak membuat kartu stock barang persediaan, pengelolaan dan penatausahaan investasi jangka panjang tidak tertib, pengelolaan aset tetap belum memadai, aset tetap dikuasai dan dikelola oleh PT JSC belum ditetapkan statusnya, penyajian aset lainnya bernilai Rp 0 dan terdapat tagihan jangka panjang atas kekurangan penerimaan penjualan kendaraan bermotor TA 2012, 2014, dan 2015 tidak tepat sebesar Rp188.986.850, dan saldo utang beban sekretariat daerah sebesar Rp2.813.709.096 tidak dapat diyakini kewajarannya.

Pada tahun 2018 Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) yang dilakukan oleh BPK pada laporan keuangan yaitu memperoleh kelemahan sistem pengendalian internal. Klasifikasi penganggaran belanja barang dan jasa serta belanja modal pada Sembilan OPD sebesar Rp36.176.052.578 tidak tepat, pelaksanaan dan pertanggungjawaban belanja hibah belum memadai, antara lain BPKAD tidak

melakukan verifikasi atas pertanggungjawaban hibah, pengelolaan dan penatausahaan investasi jangka panjang beserta hasilnya belum memadai, antara lain penerimaan pendapatan hasil investasi kurang diterima sebesar Rp894.869.557,95 dan penatausahaan, pengelolaan serta pengamanan aset tetap belum memadai.

Pada tahun 2019 Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) yang dilakukan oleh BPK pada laporan keuangan. Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan memperoleh kelemahan sistem pengendalian internal meliputi pengelolaan Dana BOS dan PSG tidak tertib, kebijakan akuntansi belum mengatur pengukuran, penilaian, penyajian, dan pengungkapan beban dibayar dimuka dan pendapatan diterima dimuka-neraca dan beban sewa gedung/rumah dinas serta beban premi asuransi-LO, pengelolaan investasi jangka panjang belum memadai, pengelolaan aset lain-lain belum memadai, penganggaran dan realisasi belanja modal serta belanja barang dan jasa tidak tepat, dan penyusunan laporan perubahan ekuitas belum memadai.

Pada Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) yang dilakukan oleh BPK pada laporan keuangan tahun 2020. Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan memperoleh juga kelemahan sistem pengendalian intern meliputi pendapatan dari pemanfaatan barang milik daerah belum optimal, perencanaan belanja hibah belum sesuai ketentuan, penatausahaan persediaan belum tertib, penyajian investasi permanen pada PD Prodexin dan PD Industri Grafika Meru tidak dapat dinilai kewajarannya, serta penatausahaan aset tetap belum tertib.

Permasalahan yang dirasakan organisasi publik tersebut memperlihatkan bahwa sistem pengendalian internal memerlukan peningkatan agar memperoleh efektivitas dalam pelaksanaannya supaya tidak terjadi peluang penyimpangan/*fraud* (Prihanto dkk., 2020), sehingga Apriani dkk (2019:7) menyatakan “Laporan keuangan yang telah dibuat akan kompeten karena dengan adanya pengendalian internal mengharuskan untuk mendeteksi penyimpangan dan melakukan pencegahan karena pemantauan tidak terbukti efektif dalam pencegahan kecurangan”. Adanya kelemahan pengendalian internal organisasi akan mendatangkan organisasi tersebut mudah terkenda dan teridentifikasi unsur

kejahatan (Rahim dkk., 2017) meliputi: penyusutan, pencurian, laporan keuangan yang tidak sesuai/fiktif serta manipulasi lainnya yang termasuk dalam unsur kecurangan.

Sistem Pengendalian Internal Pemerintah merupakan suatu hal yang mendasar dalam membenahi sistem pengelolaan keuangan pemda, supaya mendapat sistem informasi yang lebih berkualitas. Untuk itu dalam meningkatkan efektivitas sistem pengendalian internal, organisasi pemerintah perlu melakukan langkah-langkah dan sekaligus menjadi tujuan penelitian ini memperhatikan gaya kepemimpinan, budaya organisasi serta komitmen organisasi.

Gaya kepemimpinan menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi efektivitas sistem pengendalian internal. Hal ini sejalan dengan penelitian yang dinyatakan oleh Putra dkk (2015) bahwa gaya kepemimpinan yaitu pola perilaku yang mampu ditampilkan oleh pemimpin dalam mempengaruhi orang lain. Pola perilaku tersebut dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti, nilai-nilai, asumsi, persepsi, harapan dan sikap yang dimiliki dalam diri pemimpin. Selain itu, faktor yang akan meningkatkan efektivitas sistem pengendalian internal yaitu fungsi dari gaya kepemimpinan khususnya fungsi pengendalian, dimana fungsi pengendalian ini berkaitan dengan bagaimana seorang badan pengawas mengatur dan mempengaruhi seseorang agar ikut melaksanakan aturan yang berlaku yang berkaitan dengan pengendalian internal pada organisasi publik tersebut.

Setiap organisasi pemerintah memiliki budaya organisasi yang berbeda-beda yang mendorong setiap sudut pandang organisasi dan karakter anggotanya secara individu atau kelompok. Budaya organisasi yang kuat akan membangun personalitas organisasi atau jati diri organisasi. Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Kibtiyah dkk (2017) menyatakan bahwa budaya organisasi yang telah diaplikasikan dengan baik oleh seseorang akan mempengaruhi tingkah laku seseorang untuk menjadi lebih baik sesuai budaya organisasi yang telah terinternalisasi tersebut.

Faktor lain yang mempengaruhi yaitu komitmen organisasi. Menurut Robbins, (2008:100) komitmen organisasi adalah “Komitmen yang diciptakan oleh semua komponen individu dalam melaksanakan fungsional organisasi”.

Komitmen tersebut dapat terwujud apabila individu dalam organisasi tersebut melaksanakan hak dan kewajibannya yang sinkron dengan tugas dan fungsinya masing-masing dalam organisasi, karena perolehan tujuan organisasi merupakan hasil kerja setiap anggota organisasi yang bersifat kolektif. Sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Fadli Dahlan (2020) yang menyatakan bahwa komitmen organisasi memiliki peranan yang penting karena menunjukkan bahwa komitmen dari setiap komponen organisasi merupakan kunci keberhasilan dan kemajuan yang berkelanjutan.

Mengetahui betapa pentingnya gaya kepemimpinan, budaya organisasi dan komitmen organisasi untuk meningkatkan sistem pengendalian intern pemerintah, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Pengaruh Gaya Kepemimpinan, Budaya Organisasi dan Komitmen Organisasi terhadap Efektivitas Sistem Pengendalian Internal (Studi Pada Organisasi Perangkat Daerah di Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan)”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah, permasalahan yang akan dikaji dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaruh gaya kepemimpinan terhadap efektivitas sistem pengendalian internal pada Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan?
2. Bagaimana pengaruh budaya organisasi terhadap efektivitas sistem pengendalian internal pada Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan?
3. Bagaimana pengaruh komitmen organisasi terhadap efektivitas sistem pengendalian internal pada Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan?
4. Bagaimana pengaruh gaya kepemimpinan, budaya organisasi dan komitmen organisasi secara bersama-sama terhadap efektivitas sistem pengendalian internal pada Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan?

1.3 Batasan Masalah

Penelitian ini memiliki batasan masalah, agar penelitian ini fokus dan tidak meluas. Penelitian ini membahas tentang efektivitas sistem pengendalian internal dan faktor yang mempengaruhi, yaitu gaya kepemimpinan, budaya organisasi dan

komitmen organisasi. Penelitian ini dilakukan pada pemerintah Provinsi dengan objek penelitian Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang ada di Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan.

1.4 Tujuan dan Manfaat Penelitian

1.4.1 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah diuraikan sebelumnya, maka tujuan dari penelitian ini yaitu:

1. Untuk mengetahui pengaruh gaya kepemimpinan terhadap efektivitas sistem pengendalian internal Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan
2. Untuk mengetahui pengaruh budaya organisasi terhadap efektivitas sistem pengendalian internal Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan
3. Untuk mengetahui pengaruh komitmen organisasi terhadap efektivitas sistem pengendalian internal Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan
4. Untuk mengetahui pengaruh gaya kepemimpinan, budaya organisasi, dan komitmen organisasi secara bersama-sama berpengaruh terhadap efektivitas sistem pengendalian internal Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan

1.4.2 Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian, maka penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan juga pengetahuan bagi peneliti dan memberikan sumbangan terhadap pengembangan ilmu pengetahuan khususnya dalam bidang Akuntansi Sektor Publik yang berkaitan dengan gaya kepemimpinan, budaya organisasi, komitmen organisasi, dan efektivitas sistem pengendalian internal pemerintah. Selain itu penelitian ini juga bermanfaat sebagai referensi bagi peneliti lain yang berkeinginan melakukan penelitian sejenis.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan agar memberikan sumbangan pemikiran untuk Pemerintah Daerah yang ada di Provinsi Sumatera Selatan tentang hal hal yang berkaitan dengan gaya kepemimpinan, budaya organisasi, komitmen organisasi dan efektivitas sistem pengendalian internal. Penelitian ini juga dapat dipakai sebagai masukan untuk mengatasi permasalahan yang terkait dengan sistem pengendalian internal suatu pemerintah sehingga diharapkan dapat tercapainya *good governance*.

